



Contents lists available at [Journal IICET](#)

JPPi (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)

ISSN: 2502-8103 (Print) ISSN: 2477-8524 (Electronic)

Journal homepage: <https://jurnal.iicet.org/index.php/jppi>



Analisis ketimpangan kepemilikan komoditas dan pemberdayaan ekonomi mama-mama papua di pasar tradisional Manokwari, Papua Barat

Paulus Waterpauw^{*)}, Margaretha Hanita, Arthur Josias Simon Runturambi

Program Doktor Sekolah dan Kajian Strategik, Sekolah Kajian Strategik dan Global, Universitas Indonesia, Depok, Indonesia

Article Info

Article history:

Received Apr 24th, 2024

Revised May 26th, 2024

Accepted Jun 29th, 2024

Keywords:

Pemberdayaan perempuan di Papua Barat
Kebijakan pemberdayaan Ekonomi
Pergeseran perilaku

ABSTRACT

Pasar tradisional di Manokwari, Papua Barat, menjadi pusat aktivitas ekonomi lokal, khususnya bagi mama-mama Papua yang berperan sebagai pencari nafkah utama keluarga. Namun, ketimpangan kepemilikan komoditas dan akses terhadap sumber daya ekonomi menciptakan kesenjangan daya saing antara pedagang lokal dan pedagang lainnya. Penelitian ini bertujuan menganalisis ketimpangan kepemilikan komoditas dan mengevaluasi pemberdayaan ekonomi mama-mama Papua. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi lapangan, melibatkan wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen. Data dikumpulkan dari tiga pasar utama, yaitu Pasar Wosi, Pasar Sanggeng, dan Pasar Borobudur, dengan narasumber seperti pedagang lokal, kepala dinas, dan akademisi. Hasil penelitian menunjukkan ketimpangan kepemilikan komoditas disebabkan oleh keterbatasan modal, teknologi, dan akses jaringan distribusi. Program pemberdayaan pemerintah masih minim dan kurang fokus pada kebutuhan lokal. Penelitian ini menyimpulkan perlunya kebijakan inklusif berbasis kebutuhan lokal untuk mengatasi ketimpangan, melalui dukungan sektor UMKM, pelatihan keterampilan, dan pengembangan infrastruktur pasar. Implikasinya, kebijakan yang terpadu dan berkelanjutan penting untuk memberdayakan ekonomi lokal, menciptakan pasar tradisional yang adil dan inklusif, serta memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat Papua Barat.



© 2024 The Authors. Published by IICET.

This is an open access article under the CC BY-NC-SA license
(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0>)

Corresponding Author:

Paulus Waterpauw,
Universitas Indonesia
Email: pewe.fakfak@gmail.com

Pendahuluan

Pasar tradisional memiliki peran yang signifikan dalam mendukung perekonomian lokal di Indonesia, termasuk di Papua Barat (Lermating et al., 2024). Sebagai pusat transaksi ekonomi, pasar tradisional menjadi ruang interaksi antara penjual dan pembeli yang didominasi oleh masyarakat local (Ihya'Ulummudin et al., 2022; Permatasari et al., 2024). Pasar ini tidak hanya menjadi tempat distribusi barang kebutuhan sehari-hari, tetapi juga sebagai wahana penggerak sektor riil yang mencerminkan dinamika ekonomi daerah (Darwin Lie et al., 2022). Di Papua Barat, pasar tradisional memainkan peran vital dalam mendukung keberlanjutan ekonomi lokal, dengan melibatkan berbagai lapisan masyarakat, termasuk kelompok etnis asli Papua (H Hermanto Suaib, 2017).

Salah satu isu penting di pasar tradisional Papua Barat adalah ketimpangan kepemilikan dan akses terhadap komoditas, yang seringkali berdampak pada kesejahteraan ekonomi masyarakat lokal, terutama mama-mama Papua. Sebagai aktor utama dalam perdagangan pasar tradisional, mereka berperan besar dalam menggerakkan sektor ekonomi kecil-menengah (Resubun, 2017); (Warda et al., 2024). Namun, keterbatasan modal, akses terhadap komoditas unggulan, dan dominasi pedagang dari luar daerah menjadi kendala utama yang menghambat pemberdayaan mereka (Fenetiruma et al., 2022). Oleh karena itu, upaya pemberdayaan ekonomi lokal melalui peningkatan kapasitas mama-mama Papua dan penguatan struktur pasar tradisional menjadi hal mendesak untuk mendukung kemandirian ekonomi serta mengurangi ketimpangan ekonomi di wilayah tersebut. Keberadaan pasar tradisional di kawasan Manokwari tidak hanya menjadi pusat kegiatan ekonomi lokal tetapi juga mencerminkan interaksi sosial dan budaya masyarakat asli Papua (Nuhum, 2018). Kondisi geografis Manokwari, seperti topografi yang bergunung dan aksesibilitas yang terbatas ke beberapa wilayah, turut memengaruhi distribusi komoditas dan pola perdagangan di pasar tradisional. Hal ini memperbesar tantangan yang dihadapi mama-mama Papua dalam mengakses komoditas unggulan dan menjangkau pasar yang lebih luas.

Permasalahan utama yang diangkat dalam penelitian ini adalah ketimpangan yang terjadi antara pedagang lokal, termasuk mama-mama Papua, dengan pedagang non-lokal dalam menguasai komoditas di pasar tradisional. Ketimpangan ini tidak hanya mencerminkan perbedaan akses terhadap sumber daya dan modal tetapi juga menunjukkan adanya ketidakseimbangan dalam daya saing. Pedagang non-lokal sering kali memiliki keunggulan berupa jaringan distribusi yang lebih luas dan akses modal yang lebih baik, sehingga mampu menguasai pasar lebih dominan. Sebaliknya, pedagang lokal, terutama mama-mama Papua, kerap mengalami kesulitan untuk bersaing karena keterbatasan modal, keterampilan, serta kendala logistik dalam memperoleh komoditas.

Selain itu, mama-mama Papua menghadapi berbagai tantangan dalam menjalankan kegiatan ekonomi mereka di pasar tradisional. Salah satunya adalah keterbatasan akses terhadap pembiayaan yang terjangkau, minimnya dukungan teknis untuk pengelolaan usaha, serta rendahnya daya tawar mereka di pasar. Meskipun peran mereka penting sebagai penggerak sektor riil lokal, dukungan pemerintah yang spesifik untuk memberdayakan mereka masih sangat terbatas. Program-program yang ada sering kali bersifat umum dan kurang mempertimbangkan kebutuhan unik yang dihadapi oleh kelompok ini. Ketidakadilan ini menjadi penghambat utama bagi penguatan peran ekonomi mama-mama Papua, yang pada akhirnya berdampak pada kesejahteraan mereka dan perekonomian lokal secara keseluruhan.

Pentingnya mengkaji pemberdayaan ekonomi mama-mama Papua di pasar tradisional terletak pada peran strategis mereka dalam menjaga keberlanjutan ekonomi lokal sekaligus mempertahankan identitas budaya. Mama-mama Papua merupakan pelaku utama dalam perdagangan skala kecil-menengah yang menopang kebutuhan masyarakat sehari-hari. Namun, berbagai keterbatasan yang mereka hadapi, seperti akses modal, keterampilan, dan penguasaan komoditas, membuat posisi mereka di pasar tradisional sering kali kurang kompetitif. Penelitian ini menjadi penting untuk menggali akar permasalahan yang dihadapi oleh mama-mama Papua serta merumuskan langkah strategis yang dapat meningkatkan kapasitas dan daya saing mereka sebagai bagian integral dari perekonomian lokal.

Ketimpangan ekonomi yang terjadi di pasar tradisional memiliki dampak signifikan terhadap keadilan sosial dan keberlanjutan ekonomi di Manokwari. Ketidakmampuan mama-mama Papua untuk bersaing secara setara dengan pedagang non-lokal tidak hanya mengancam kesejahteraan individu mereka, tetapi juga memperbesar kesenjangan sosial di wilayah tersebut. Jika dibiarkan, situasi ini dapat memicu ketidakstabilan sosial dan melemahkan struktur ekonomi lokal. Oleh karena itu, diperlukan solusi berbasis kebijakan yang mampu memberikan dukungan nyata bagi mama-mama Papua. Kebijakan ini harus dirancang untuk meningkatkan akses mereka terhadap sumber daya, menciptakan lingkungan perdagangan yang inklusif, dan memperkuat peran mereka sebagai penggerak utama sektor riil lokal di Manokwari.

Tiga konsep teori yang relevan dengan penelitian ini adalah teori ketimpangan ekonomi, teori pemberdayaan perempuan, dan teori ekonomi lokal. Teori ketimpangan ekonomi menjelaskan bagaimana distribusi sumber daya yang tidak merata dapat memperburuk kesenjangan antara kelompok masyarakat, seperti antara pedagang lokal (mama-mama Papua) dan pedagang non-lokal di pasar tradisional (Jetten et al., 2021); (Bapuji et al., 2020; Goya-Tocchetto & Payne, 2022). Dalam konteks ini, ketimpangan ekonomi terlihat jelas dalam dominasi pedagang non-lokal atas komoditas dan akses pasar. Sementara itu, teori pemberdayaan perempuan menekankan pentingnya meningkatkan peran perempuan dalam perekonomian, dengan memberikan mereka akses yang lebih besar terhadap sumber daya dan keterampilan untuk memperkuat daya saing mereka (Habib & Sutopo, 2024; Setiadi et al., 2023; Sujarot, 2024).

Mama-mama Papua, sebagai bagian dari kelompok perempuan yang terlibat aktif di pasar tradisional, membutuhkan pemberdayaan ekonomi yang dapat mengurangi ketimpangan dan meningkatkan kesejahteraan mereka. Teori ekonomi lokal, di sisi lain, berfokus pada peran pasar tradisional sebagai motor penggerak ekonomi daerah, dengan menekankan pentingnya pasar ini dalam menciptakan keberlanjutan ekonomi lokal (Cvijanović et al., 2020; Enaifoghe & Vezi-Magigaba, 2023; Leigh, 2024). Penelitian ini menghubungkan ketiga teori tersebut untuk menganalisis bagaimana ketimpangan dalam kepemilikan komoditas di pasar tradisional Manokwari dapat diatasi melalui pemberdayaan ekonomi mama-mama Papua, serta bagaimana kebijakan pemerintah dapat mendukung perkembangan ekonomi lokal secara lebih adil dan berkelanjutan.

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas bagaimana pemberdayaan perempuan, khususnya di daerah pedesaan atau terpencil, dapat meningkatkan kesejahteraan mereka melalui akses yang lebih baik terhadap modal, pendidikan, dan pasar. Sebagai contoh, penelitian oleh Kowarin et al., (2024) dan Macpal & Sahetapy (2024) menunjukkan bahwa pemberdayaan perempuan di pasar tradisional dapat meningkatkan partisipasi mereka dalam pengambilan keputusan ekonomi dan memperkuat posisi mereka di pasar. Penelitian lainnya oleh Suasridewi et al., (2024) menunjukkan bahwa pemberdayaan perempuan berdampak positif pada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan keluarga, pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesehatan dan pendidikan, serta pengurangan kesenjangan sosial.

Hasil penelitian Muna (2023) menunjukkan dinamika Pasar Tradisional Sukorejo sebagai ruang publik perempuan. Aktivitas perempuan di Pasar Tradisional Sukorejo meliputi peran sebagai pemilik usaha, pengelola usaha, dan pekerja. Dalam aktivitasnya, perempuan memiliki tingkat akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat yang berbeda dan masih menghadapi keterbatasan yang disebabkan adanya stereotip, subordinasi, marginalisasi, dan beban kerja ganda yang memengaruhi kehidupan mereka. Faktor-faktor seperti faktor ekonomi, faktor sosial dan budaya, faktor keterbatasan akses ke pekerjaan lain, serta faktor kepemilikan usaha mempengaruhi keterlibatan perempuan di pasar tradisional. Pasar tradisional sebagai ruang publik perempuan berdampak pada aspek ekonomi, sosial, dan budaya. Namun dalam beberapa hal perempuan masih memiliki keterbatasan dalam akses pengambilan keputusan. Penelitian-penelitian terdahulu yang telah diulas relevan karena memberikan landasan bagi upaya pemberdayaan mereka dan kebijakan yang dapat mengurangi ketimpangan ekonomi di Manokwari.

Kesenjangan dalam penelitian ini terletak pada kurangnya kajian yang secara khusus mengidentifikasi dan menganalisis ketimpangan ekonomi yang terjadi antara pedagang lokal, terutama mama-mama Papua, dengan pedagang non-lokal di pasar tradisional Manokwari. Meskipun telah ada penelitian tentang pemberdayaan perempuan dan ketimpangan ekonomi di pasar tradisional di daerah lain, penelitian yang berfokus pada konteks geografis dan sosial budaya Papua Barat, khususnya Manokwari, masih terbatas. Selain itu, meskipun beberapa penelitian menyentuh aspek pemberdayaan ekonomi perempuan, belum ada yang secara mendalam menghubungkan pemberdayaan mama-mama Papua dengan kebijakan spesifik yang mendukung pengurangan ketimpangan dalam sektor pasar tradisional. Kesenjangan ini memberikan ruang bagi penelitian ini untuk menggali lebih lanjut tentang peran pemerintah dalam menciptakan kebijakan yang inklusif dan berbasis kebutuhan lokal, serta untuk mengembangkan strategi yang dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi mama-mama Papua dalam pasar tradisional.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis ketimpangan dalam kepemilikan komoditas di pasar tradisional Manokwari, khususnya antara pedagang lokal seperti mama-mama Papua dan pedagang non-lokal. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi strategi pemberdayaan ekonomi yang dapat meningkatkan daya saing dan kesejahteraan mama-mama Papua sebagai penggerak utama sektor riil lokal. Selain itu, penelitian ini bertujuan mengevaluasi peran pemerintah dalam memberikan dukungan melalui kebijakan yang inklusif dan berkelanjutan guna menciptakan lingkungan pasar yang lebih adil, memperkuat ekonomi lokal, dan mengurangi kesenjangan sosial ekonomi di wilayah tersebut.

Pembangunan Ekonomi

Tujuan utama dalam pengembangan suatu daerah adalah menciptakan kesejahteraan rakyat, salah satu jalannya menggalakkan pembangunan ekonomi yang menjadi sarana dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat. Menurut Dewi et al., (2022) pembangunan ekonomi ialah salah satu faktor penting dalam membangun perekonomian wilayah agar memiliki daya saing yang tinggi sehingga dapat terus bertumbuh dan dapat mendorong pertumbuhan sektor-sektor lainnya.

Pembangunan dipaparkan sebagai proses multidimensi yang dapat mengakibatkan berubahnya karakteristik utama dari masyarakat, sebagai contoh adanya perubahan kondisi ekonomi, struktur sosial di masyarakat, sistem nilai yang terkandung pada masyarakat dan juga perekonomiannya. Lebih lanjut dijelaskan bahwa pembangunan ekonomi sebagai salah satu dari proses meningkatnya pendapatan per kapita secara riil dan berkelanjutan. Hal ini menurut Syahri & Gustiara (2020) dijelaskan sebagai salah satu proses yang menjadikan

masyarakat memiliki peningkatan pendapatan per kapita secara berkelanjutan pada jangka waktu yang begitu panjang ditandai dengan perubahan struktur ekonomi dan semakin baik kelembagaan.

Pada dasarnya pembangunan ekonomi mempunyai empat dimensi pokok yaitu: (1) pertumbuhan, (2) penanggulangan kemiskinan, (3) perubahan atau transformasi ekonomi, dan (4) keberlanjutan pembangunan dari masyarakat agraris menjadi masyarakat industri. Proses dalam pembangunan perekonomian di Indonesia bergantung pada kekayaan sumber daya alam, faktor sumber daya manusia, investasi, bisnis, dan teknologi sebagai unsur dari perekonomian. Akan tetapi, peningkatan pada ekonomi tidak bisa tercipta jika beberapa aspek seperti nilai moral, sikap budaya, lembaga sosial masyarakat dan kondisi perpolitikan di Indonesia tidak baik karena hal tersebut sebagai faktor non-ekonomi dari pembangunan ekonomi (Hasid et al., 2022).

Lebih lanjut Windari, (2021) menjelaskan mengenai tujuan utama dalam pembangunan ekonomi agar membangun infrastruktur modal dengan skala yang besar sehingga bisa meningkatkan produktivitas baik di bidang pertanian, pertambangan, perkebunan dan industri. Pembangunan ekonomi suatu negara tergantung pada sumber daya alam, sumber daya manusia, modal, usaha, teknologi sebagai faktor ekonomi. Namun, pertumbuhan ekonomi tidak mungkin terjadi selama lembaga sosial, kondisi politik, sikap budaya, nilai moral dalam suatu bangsa tidak menunjang sebagai faktor non ekonomi. Lebih lanjut tujuan pokok pembangunan ekonomi itu sendiri adalah untuk membangun peralatan modal dalam skala yang cukup untuk meningkatkan produktivitas di bidang pertanian, pertambangan, perkebunan dan industri (Windari, 2021).

Ekonomi Kerakyatan

Salah satu tujuan pembangunan yang dimaksud dalam Otonomi Khusus di antaranya ialah pembangunan untuk perekonomian rakyat (Fatahillah et al., 2021). Perekonomian kerakyatan pada dasarnya adalah suatu sistem perekonomian yang bertumpu pada kekuatan ekonomi kerakyatan. Sektor pembangunan ekonomi mempunyai peranan penting bagi kesejahteraan bangsa. Selain itu, pembangunan nasional ditujukan untuk mencapai taraf hidup masyarakat dalam tingkat kesejahteraan, kesehatan, dan pendidikan. Indikator pembangunan ekonomi adalah meningkatnya pertumbuhan ekonomi, meningkatnya pendapatan per kapita, semakin besarnya kesempatan kerja serta berkurangnya angka pengangguran dan kemiskinan (Rochendi & Saleh, 2017).

Ujung tombak perekonomian masyarakat di Papua adalah para pedagang pasar lokal yang biasa disapa 'mama-mama' dan mereka berusaha meningkatkan perekonomian keluarga saat ini. Peran perempuan dalam penyediaan kebutuhan dasar di Papua bukanlah hal baru. Apalagi peran ganda perempuan di Papua merupakan kewajiban perempuan dalam memenuhi kebutuhan pokok keluarganya. Ketidakadilan yang terjadi pada perempuan Papua disebabkan oleh adat. Masyarakat di Papua menggambarkan bahwa peran laki-laki dan perempuan diam-diam berbeda. Laki-laki berperan menebang pohon dan membelah batang pohon dan pekerjaan selanjutnya seperti menumbuk dan mengolah sagu dilakukan oleh perempuan. Umumnya wanita akan menyediakan makanan dan menangkap ikan di laut atau sungai. Sementara itu, laki-laki biasanya sibuk dengan perang antarsuku (Rumkabu et al., 2023).

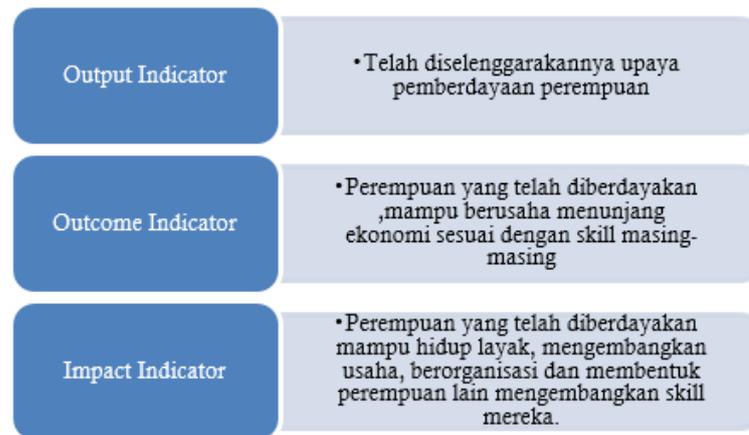
Budaya patriarki yang terus tumbuh dan bertahan di tengah masyarakat Papua hingga saat ini menyebabkan perempuan berada di garda terdepan dalam memperjuangkan kelangsungan hidup keluarga. Perempuan menjual beberapa produk di pasar seperti produk yang telah diolah atau ditanam, mereka juga menjual kembali produk yang telah dibeli dari orang lain. Penjual dengan harapan mendapat untung. Perjuangan mama-mama Papua di pasar tradisional yang memperjuangkan perekonomian keluarga, selain tugas lain seperti bekerja di ladang dan mengasuh anak, tidak mudah untuk dibayangkan. Permasalahan ini disebabkan oleh sulitnya akses terhadap pasar dan kios di pasar tradisional yang masih didominasi oleh pedagang pendatang, bukan masyarakat asal. Papua sebagai daerah yang kaya akan sumber daya alam menyebabkan banyak terjadi kegiatan ekstraktif di wilayah tersebut sehingga berdampak pada kerusakan lingkungan.

Kebanyakan mama-mama memilih berjualan di jalanan sekitar pasar tanpa atap, di jalan tanah yang kondisinya berdebu dan becek saat musim hujan. Mama-mama ini memajang produknya dengan menggunakan karung, plastik atau tanpa soket. Komoditasnya adalah produk lokal seperti cabai, tomat, kangkung, pisang, umbi-umbian, pinang dan sirih sebagai alat penghubung untuk mempererat komunikasi antar masyarakat asli Papua dan kerajinan tangan lainnya.

Pemberdayaan Perempuan

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan mengartikan pemberdayaan perempuan sebagai usaha untuk memberikan perempuan kemampuan untuk memperoleh akses dan kontrol terhadap sumberdaya, ekonomi, politik, sosial, budaya dan lainnya, sehingga perempuan dapat mengandalkan dirinya, tidak bergantung dengan pihak lain dan memiliki rasa percaya diri untuk berperan dan berpartisipasi aktif dalam memecahkan masalah, sehingga mampu membangun kemampuan dan konsep diri.

Menurut Azizah et al., (2023) ada sejumlah indikator keberhasilan dalam upaya pemberdayaan perempuan jika telah terpenuhinya sejumlah kondisi atau keadaan sebagaimana berikut: 1) Output indicator, (indikator keluaran), yakni ketika program pemberdayaan terhadap perempuan telah dilaksanakan. 2) Outcome indicator (indikator hasil), yakni ketika program pemberdayaan telah mampu mencetak perempuan mandiri yang mampu meningkatkan kemampuan ekonomi dengan mengandalkan skillnya sendiri. 3) Impact indicator (indikator dampak), yaitu ketika perempuan yang diberdayakan telah mampu hidup layak, mampu mengembangkan usaha, berorganisasi atau bermasyarakat dan mencetak kader perempuan lain guna mengembangkan keterampilan mereka.



Gambar 1 <Indikator Pemberdayaan Perempuan. Sumber: Siti Nur Qodariyah (2015)>

Pemberdayaan perempuan yang telah berhasil juga dapat dicirikan dengan dua kondisi. Pertama, sebagai pemberdayaan perempuan merupakan cermin kepentingan emansipatoris yang mendorong masyarakat berpartisipasi secara kolektif dalam pembangunan. Kedua, sebagai proses pelibatan diri individu atau masyarakat dalam proses pencerahan, penyadaran dan pengorganisasian kolektif sehingga para perempuan dapat berpartisipasi secara aktif. Pemberdayaan terhadap perempuan adalah salah satu cara strategis untuk meningkatkan potensi perempuan dan meningkatkan peran perempuan baik dalam lingkup dalam rumah tangga maupun luar rumah.

Dalam konteks mama-mama Papua pelaku pasar, pemberdayaan perempuan lebih banyak ditekankan untuk meningkatkan kemampuan dalam mengelola usaha. Setidaknya terdapat lima upaya penting yang perlu diperhatikan dalam upaya pengembangan kemampuan berwirausaha bagi perempuan. Menurut IMF Muhammad, (2022), cara yang dapat dilakukan sebagai berikut: a.) Membantu dan mendorong kaum perempuan untuk membangun dan mengembangkan pengetahuan secara kompetensi diri mereka, melalui berbagai program pelatihan. b.) Membantu kaum perempuan dalam strategi usaha dan pemasaran produk. c.) Memberikan pemahaman terhadap regulasi dan peraturan pemerintah terkait dengan legalitas dunia usaha. d.) Mendorong dan membantu kaum perempuan untuk mampu menggunakan teknologi informasi dan komunikasi secara optimal. e.) Membuat usaha mikro/jaringan usaha mikro perempuan atau forum pelatihan usaha.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Menurut Yulianah (2022), metode penelitian kualitatif bertujuan untuk memberi penjelasan atau deskripsi masalah, kemudian menganalisis peristiwa, fenomena, aktivitas sosial, kepercayaan, sikap, persepsi, serta gagasan yang dibawa oleh individu atau kelompok. Metode ini dipilih karena sesuai dengan tujuan utama penelitian ini, yang adalah untuk menganalisis ketimpangan kepemilikan komoditas dan pemberdayaan ekonomi mama-mama Papua di pasar tradisional Manokwari, Provinsi Papua Barat, dari perspektif pembangunan ekonomi. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat menggali lebih dalam mengenai fenomena ketimpangan ekonomi di pasar tradisional, memahami perubahan perilaku para mama-mama OAP sebagai pelaku pasar, dan menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi pemberdayaan mereka dalam sektor pasar.

Pemilihan lokasi penelitian yang mencakup tiga pasar tradisional di Manokwari, yaitu Pasar Wosi, Sanggeng, dan Borobudur, didasarkan pada representasi masing-masing pasar terhadap dinamika ekonomi lokal yang melibatkan mama-mama Papua sebagai pelaku utama dalam sektor pasar tradisional. Pasar Wosi, misalnya, dikenal sebagai salah satu pasar terbesar yang menjadi pusat perdagangan barang kebutuhan sehari-hari di kawasan pesisir, sementara Pasar Sanggeng lebih berfokus pada perdagangan komoditas lokal dan hasil

pertanian, dan Pasar Borobudur memiliki peran penting dalam sektor perdagangan barang-barang kebutuhan masyarakat kelas menengah ke bawah. Karakteristik ekonomi dan sosial masing-masing pasar ini relevan dengan masalah penelitian karena mereka memiliki perbedaan dalam struktur komoditas yang diperjualbelikan, tingkat keterlibatan pedagang lokal versus non-lokal, serta akses terhadap pasar yang lebih luas. Ketiga pasar ini menggambarkan variasi dalam dinamika ketimpangan kepemilikan komoditas dan pemberdayaan ekonomi mama-mama Papua, yang memungkinkan penelitian untuk mengidentifikasi faktor-faktor spesifik yang memengaruhi pemberdayaan ekonomi dan peran pemerintah di setiap lokasi.

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling, yaitu teknik pemilihan sampel berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Teknik ini dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk mendalami secara mendalam fenomena ketimpangan kepemilikan komoditas dan pemberdayaan ekonomi mama-mama Papua di pasar tradisional Manokwari. Sampel akan dipilih berdasarkan kriteria tertentu, seperti pedagang mama-mama Papua yang terlibat langsung dalam kegiatan ekonomi pasar, serta pedagang non-lokal yang berperan dalam distribusi komoditas di pasar tersebut. Selain itu, pejabat dinas terkait yang memiliki pengetahuan tentang kebijakan pemerintah dalam pemberdayaan ekonomi lokal juga akan dijadikan sampel. Dengan menggunakan purposive sampling, peneliti dapat memastikan bahwa sampel yang dipilih benar-benar relevan dan dapat memberikan informasi yang mendalam tentang isu yang diangkat, sehingga temuan penelitian dapat lebih komprehensif dan sesuai dengan tujuan penelitian.

Untuk membedah permasalahan penelitian, dilakukan studi yang menyeluruh menggunakan teknik pengumpulan data langsung melalui observasi dan wawancara. Observasi dilakukan di tiga pasar tradisional di Manokwari untuk mencatat dinamika pasar, distribusi komoditas, serta interaksi antara pedagang lokal dan non-lokal. Wawancara dilakukan kepada mama-mama Papua yang terlibat dalam aktivitas ekonomi pasar, serta pedagang non-lokal, untuk menggali pandangan mereka mengenai ketimpangan yang terjadi. Selain itu, wawancara juga dilakukan kepada pejabat dari dinas terkait seperti Dinas Perdagangan, Dinas Koperasi dan UMKM, Bappeda, serta Bagian Pemberdayaan OAP Biro Otonomi Khusus untuk mendalami peran kebijakan pemerintah dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal. Data sekunder, seperti dokumentasi dari pemerintah setempat dan laporan kebijakan, juga digunakan untuk melengkapi analisis.

Sumber data penelitian ini berasal dari data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan pedagang dan pejabat dinas terkait, serta dokumentasi resmi dari pemerintah setempat. Peneliti akan menggunakan teknik analisis tematik untuk mengidentifikasi dan mengorganisir tema-tema utama yang muncul dari data wawancara dan observasi. Analisis ini akan membantu mengungkap ketimpangan dalam kepemilikan komoditas, hambatan pemberdayaan ekonomi yang dihadapi oleh mama-mama Papua, serta peran pemerintah dalam menciptakan kebijakan yang mendukung sektor riil di pasar tradisional. Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan mengenai langkah-langkah konkret untuk mengurangi ketimpangan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan mama-mama Papua di pasar tradisional Manokwari.

Untuk meminimalkan potensi bias yang muncul akibat asumsi pribadi peneliti, salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan menerapkan teknik member checking. Member checking adalah proses di mana peneliti kembali kepada responden untuk memverifikasi dan memastikan bahwa interpretasi atau temuan yang dihasilkan dari data yang dikumpulkan akurat dan sesuai dengan pengalaman serta pandangan mereka. Dengan melibatkan responden dalam memeriksa temuan atau kesimpulan yang dibuat, peneliti dapat memastikan bahwa data yang diinterpretasikan tidak terdistorsi oleh pandangan atau preferensi pribadi peneliti. Dalam konteks penelitian ini, member checking dapat dilakukan dengan mengundang para mama-mama Papua, pedagang lokal, maupun pejabat dinas untuk memeriksa apakah hasil wawancara atau analisis yang dilakukan mencerminkan kenyataan yang mereka alami di pasar tradisional. Melalui proses ini, potensi bias yang timbul dari asumsi pribadi peneliti dapat dikurangi, serta keabsahan dan validitas data penelitian dapat terjamin dengan lebih baik, sehingga temuan yang dihasilkan lebih objektif dan dapat dipercaya.

Hasil dan Pembahasan

Kepemilikan Komoditas Barang Dagangan di Pasar Tradisional Kabupaten Manokwari

Manokwari sebagai ibukota pusat pemerintahan Provinsi Papua Barat, tentu memiliki laju aktivitas perekonomian yang cukup tinggi. Sejak Papua Barat dibentuk pada 2004, hotel, mal, pertokoan dan pasar tradisional berdiri di Manokwari, melengkapi syarat sebuah kota modern. Kota ini memiliki tiga lokasi perbelanjaan tradisional, yakni Pasar Wosi, Pasar Sanggeng dan Pasar Sore Borobudur. Pasar Wosi ialah salah satu pasar terbesar dan ikonik yang terletak di Jalan Pasir, Kelurahan Wosi, Manokwari Barat. Menurut data dari Disperindagkop Kabupaten Manokwari, ada sekitar 1.835 pedagang yang berjualan di Pasar Wosi, jumlah itu belum termasuk pedagang musiman yang akan berdatangan ke pasar saat tanaman hasil kebun mereka berbuah atau panen. Menjadi pasar sentral, Pasar Wosi juga kerap dilanda sejumlah masalah, karena sering

terjadi kebakaran. Selain itu, limbah pasar juga tidak dikelola dengan baik, karena para pedagang kerap tidak menjaga ketertiban dan kebersihan lingkungan pasar.



Gambar 2 <Pasar Sentral Wosi.Sumber: Dokumentasi Peneliti (2024)>

Selain Pasar Wosi, di Manokwari ada Pasar Sanggeng yang sedang direnovasi menjadi pasar modern sejak 2023 lalu telah dimulai pembangunannya. Pasar Sanggeng telah puluhan tahun menjadi pusat perputaran perekonomian daerah. Namun, sudah lama tidak beroperasi karena mengalami kerusakan dan beberapa kali mengalami musibah kebakaran. Oleh karena itu, pemerintah pusat kemudian memberikan dukungan untuk membangkitkan ekonomi Manokwari melalui pembangunan pasar Sanggeng. Pasar Sanggeng akan dibangun tiga lantai, di atas lahan seluas 27.809-meter persegi, luas bangunan 21.519-meter persegi dan memiliki kapasitas pedagang los sebanyak 1.016 unit, dan kios 394 unit dengan waktu pelaksanaan 270 hari kalender atau hingga Juli 2024.



Gambar 3 <Rencana Pembangunan Pasar Sentral Sanggeng. Sumber: KemenPUPR Proyek Pasar Sanggeng Manokwari (2023)>

Pembangunan proyek diawali dengan peletakan batu pertama oleh Pj. Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw, Bupati Manokwari Hermus Indou, Kepala BPPW Papua Barat Marsudi dan Forkopimda, Rabu (25/10/2023). Pada saat peletakan batu pertama, Pj. Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw mengatakan, Kabupaten Manokwari sebagai ibukota Provinsi Papua Barat pembangunannya harus didukung dengan sejumlah proyek strategis nasional, seperti Pasar Sanggeng. Sehingga disarankan, apabila nantinya pasar telah selesai dibangun, dapat memberdayakan para pedagang yang memiliki daya saing. Selama ini, Pasar Sanggeng menjadi pusat perputaran perekonomian karena melayani warga dari Manokwari, Manokwari Selatan, Pegunungan Arfak, Teluk Bintuni dan Teluk Wondama. Menurut keterangan Abdul Rachman, Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop) Kabupaten Manokwari, Pasar Sanggeng mengakomodasi sekitar 1.200 pedagang.

Terakhir, adalah Pasar Borobudur yang menurut keterangan warga lokal semula merupakan pasar kaget, tapi karena kemudian semakin banyak yang ikut berjualan, akhirnya Pasar Borobudur menjadi semakin terkenal. Pasar ini juga berbeda dari kedua pasar sebelumnya, karena pasar ini baru buka di waktu sore hingga

tengah malam. Saat Pasar Sanggeng direnovasi, seperti pada saat penelitian ini dilakukan, sejumlah pedagangnya berjualan ke Pasar Borobudur. Salah satu ciri khas yang ada di Pasar Borobudur dan tidak dijumpai di pasar lain ialah pedagang ikan asap yang berjejer di sepanjang Jalan Sudirman, Kelurahan Padarni, Kecamatan Manokwari Timur ini. Namun hingga kini meskipun banyak masyarakat yang bertransaksi di sana, pemerintah daerah belum memfungsikan lokasi tersebut sebagai pasar secara resmi dengan alasan belum masuknya aliran listrik. Pedagang yang ada mengambil arus listrik untuk berjualan di malam hari dengan menumpang listrik dari rumah-rumah yang berada di area sekitar pasar.

Dari ketiga pasar tersebut, peneliti mewawancarai sejumlah mama-mama pedagang sayur dan buah-buahan komoditas lokal. Di Pasar Wosi, setidaknya ada 150 pedagang sayur dan komoditas lokal yang berjualan sepanjang hari. Mayoritas para pedagang sayur di sini adalah Orang Asli Papua, diikuti oleh pendatang dari Sulawesi, Toraja, Jawa dan Maluku. Kebanyakan hasil sayur seperti kubis, kentang, kol, wortel, kacang panjang, bawang dan cabai berasal dari wilayah pegunungan. Salah seorang pedagang sayuran di Pasar Sanggeng, responden A, menyebutkan bahwa ia sudah berdagang di pasar tersebut selama 15 tahun. Saat ditemui pada Maret 2024, ia berdagang daun ubi, dan sayuran hijau. Ia termasuk penjual yang menjajakan barang dagangan hasil dari kebunnya sendiri. Namun ia tak menampik bahwa mayoritas pedagang di Pasar Sanggeng saat ini sudah banyak yang mengambil sayur-mayur dan buah-buahan dari pengepul sayuran, bukan menjual hasil kebun yang mereka miliki sendiri.

"Saya sudah berdagang di Pasar Sanggeng selama 15 tahun. Saya menjual daun ubi dan sayuran hijau yang semuanya berasal dari kebun saya sendiri. Namun, saat ini mayoritas pedagang di Pasar Sanggeng sudah banyak yang membeli sayur-mayur dan buah-buahan dari pengepul sayuran, bukan lagi menjual hasil kebun mereka sendiri" (Responden A, Maret 2024).



Gambar 4 <Wawancara dengan Mama-mama Pedagang Sayur di Pasar Sanggeng. Sumber: Dokumentasi peneliti (2024)>

Sementara, responden B dari Pasar Borobudur, menyebutkan bahwa ia berdagang sayur-mayur di pasar, yang ia dapatkan dari pengepul. Ia membeli barang dagangan berupa aneka sayur mayur seperti wortel, kubis, singkong, cabai, kentang, dan lainnya dengan sistem beli putus. Artinya, mereka membeli sayur-mayur dengan harga borongan, yang kemudian diecer kepada para pembeli dengan mengambil selisih harga. Sayur-mayur dan buah yang mereka beli kebanyakan berasal dari daerah pegunungan dan kawasan perkebunan yang dikelola para transmigran.

"Saya berdagang sayur-mayur di pasar, dan barang dagangan saya kebanyakan saya dapatkan dari pengepul. Saya membeli aneka sayur seperti wortel, kubis, singkong, cabai, kentang, dan lainnya dengan sistem beli putus. Sayur-sayuran dan buah-buahan yang kami beli kebanyakan berasal dari daerah pegunungan dan kawasan perkebunan yang dikelola oleh para transmigran" (Responden B, Maret 2024).

Responden C, yang juga berdagang dari Pasar Sanggeng, menegaskan bahwa mama-mama pelaku pasar di Manokwari saat ini lebih pragmatis. Bagi mereka yang penting, bisa mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya di pasar. Sehingga, ketika hasil kebun mereka belum berbuah atau bisa menghasilkan, maka mereka tetap berdagang dengan cara mengambil sayur-mayur atau buah-buahan dari daerah lain untuk dijual kembali di pasar.

“Zaman dulu, orang pergi ke pasar (berjualan) ketika mereka dapat hasil dari kebun, sekarang yang penting bisa dapat uang untuk makan dan anak sekolah,” tutur responden C yang mengaku bahwa suaminya berprofesi sebagai nelayan ini.

Dari wawancara dengan ketiga responden, dapat disimpulkan bahwa para pedagang di pasar tradisional Manokwari, khususnya mama-mama Papua, menghadapi dinamika ekonomi yang beragam dalam menjalankan usaha mereka. Dari ketiga wawancara tersebut dapat dilihat bahwa kepemilikan komoditas barang dagangan di Manokwari didominasi oleh pihak lain selain penjual. Artinya mama-mama pelaku pasar di pasar tradisional Manokwari tidak lagi menjual barang dagangan hasil kebun sendiri, melainkan mengambil barang dagangan dari pihak lain, kecuali para pedagang musiman yang tidak setiap hari berjualan di pasar. Keseluruhan wawancara ini menunjukkan adanya ketergantungan yang semakin besar terhadap pengepul dan komoditas dari luar daerah, yang berpotensi mengurangi ketahanan ekonomi lokal dan pemberdayaan ekonomi berbasis sumber daya lokal.

Senada dengan para pedagang pasar di Manokwari, Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomi Universitas Papua, DR. Ir. Rully N. Wurarah, M.Si. menegaskan bahwa memang ada pergeseran perilaku di kalangan pedagang pasar di Manokwari, utamanya sangat terasa dalam 10 tahun terakhir ini. Menurutnya, zaman dahulu setiap lahan yang kosong (tidak ditempati) atau lahan di sekitar area tempat tinggal warga biasanya selalu ditanami dan dimanfaatkan warga lokal untuk berkebun. Hasil kebun tersebut jika sudah tiba masa panen biasanya dibagi-bagikan ke tetangga sekitar, lalu dijual ke pasar.

“Hari ini, sudah semakin jarang warga setempat yang berkebun. Biasanya kalau ada lahan kosong sering ditanami ubi, ketimun, papaya, atau pisang. Saya tanya mereka, ‘Mama kenapa tidak tanam lagi? Mereka bilang, rugi.’ Lebih baik ke terminal, tunggu kendaraan bawa sayur. Jadi ada semacam perubahan yang terjadi, karena produksi hasil perkebunan dan pertanian dari Perafi, Oransbari, Ransiki dan kawasan SP (area transmigrasi) sudah semakin deras masuk ke Manokwari, Akhirnya, mama-mama kalah bersaing,” ujar Rully.

Sebagai akademisi dan warga Manokwari, Rully melihat, pembangunan infrastruktur yang terjadi di Papua Barat, khususnya wilayah Manokwari menyebabkan akses terbuka lebar bagi orang-orang yang tinggal di wilayah terpencil untuk masuk ke pusat kota. Sebagai dampaknya, terjadi persaingan kualitas dan kuantitas terhadap komoditas-komoditas yang ada di pasar. Apalagi, jika produk-produk pertanian dan perkebunan yang ada di wilayah transmigrasi secara kualitas lebih baik, lebih bervariasi dan tentu dijual lebih murah karena diproduksi secara massif dan berskala besar di lokasi-lokasi transmigrasi yang dihuni kaum pendatang.

Dari hasil wawancara dan observasi di lapangan, dapat diketahui bahwa terjadi pergeseran perilaku yang terjadi di kalangan mama-mama OAP (Orang Asli Papua) pelaku pasar tradisional. Dari semula mama-mama OAP biasanya menjual komoditas hasil kebun yang mereka tanam sendiri, kini mereka mengambil komoditas milik orang lain untuk dijual. Model perdagangan komoditas tani dan kebun yang berlaku di wilayah Papua masih berlangsung secara tradisional, setidaknya ada beberapa macam. Yakni, dengan sistem beli putus, dengan cara pedagang membeli komoditas secara penuh di awal, untuk kemudian dijual lagi dengan mengambil keuntungan. Kedua, dengan sistem titip jual, yakni pedagang hanya dititipi barang dagangan yang diambil margin dari harga yang telah ditentukan oleh pemilik barang dagangan. Sementara yang ketiga dengan cara bagi hasil, yakni pedagang mengambil persentas keuntungan yang telah disepakati dari hasil barang dagangan yang laku terjual.

Pergeseran perilaku ini jika ditelusuri disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, karena mayoritas awalnya mama-mama OAP ini merupakan petani subsisten. Berarti bahwa produksi mereka hanya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, belum mengarah bagaimana menciptakan keuntungan dari pertanian mereka. Kedua, Karena masih menerapkan sistem bertani dan berkebun secara tradisional, maka seringkali hasil tanaman mereka tak sebanding dengan biaya produksinya. Seringkali di kalangan mama-mama pelaku pasar, biaya keuntungan hasil penjualan langsung habis untuk biaya transportasi pulang pergi ke pasar. Sehingga keuntungan dari barang dagangan sangat kecil atau bahkan malah merugi. Hal ini diamini oleh responden C, yang bercerita kepada peneliti bahwa ongkos transportasi dari Pasar Sanggeng ke wilayah Pegunungan Arfak sebesar Rp 200.000, sementara dirinya seringkali berjualan sehari hanya mendapat uang hasil berjualan sebesar Rp 100.000-150.000 sehingga uang hasil dagangan tak mencukupi untuk dibawa pulang karena sudah habis untuk biaya perjalanan. Ketiga, tak dapat dipungkiri bahwa terjadinya pergeseran perilaku mama-mama OAP pelaku pasar tak lagi menjual barang komoditas milik sendiri ini karena produk-produk mereka kalah bersaing dengan komoditas hasil kebun dan pertanian milik kaum pendatang yang tinggal di wilayah transmigrasi. Kaum pendatang di wilayah Papua Barat banyak ditempatkan di SP (Satuan Pemukiman) di wilayah pegunungan dan dataran yang subur untuk ditanami. Berikut ini kita bisa melihat data luas tanaman di Kabupaten Manokwari Papua Barat.

Kecamatan District	Kelapa Sawit/Oil Palm		Kelapa/Coconut	
	2022	2023*	2022	2023*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Warmare	2.651	2.651	17	17
2. Prafi	4.609	4.609	221	221
3. Manokwari Barat	–	–	123	123
4. Manokwari Timur	–	–	370	370
5. Manokwari Utara	–	–	100	100
6. Manokwari Selatan	–	–	100	100
7. Tanah Rubuh	–	–	30	30
8. Masni	6.080	6.080	222	222
9. Sidey	9.566,66	9.566,66	398	398
Kabupaten Manokwari	22.906,66	22.906,66	1.581	1.581

Figure 5. Luas Areal Tanaman Perkebunan Menurut Jenis Tanaman di Manokwari
Sumber: BPS Manokwari (2024)

Kecamatan District	Kentang Potato		Kubis Cabbage		Tomat Tomato	
	2022	2023*	2022	2023*	2022	2023*
(1)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Warmare	150	1.035	450	592	938	1.013
Prafi	–	–	1.950	95	10.188	2.141
Manokwari Barat	–	–	–	–	5.563	385
Manokwari Timur	–	–	–	–	2.313	1.440
Manokwari Utara	–	–	–	–	2.250	1.095
Manokwari Selatan	–	–	–	–	6.145	1.613
Tanah Rubuh	–	–	–	–	366	356
Masni	–	–	–	–	1.875	3.311
Sidey	–	–	–	–	7.813	1.598
Kabupaten Manokwari	150	1.035	2.400	686	37.449	12.951

Sumber: BPS Kabupaten Manokwari (2024)

Jika melihat dari data konsentrasi kawasan perkebunan di Kabupaten Manokwari, maka dapat dilihat bahwa sejumlah tanaman perkebunan dan komoditas lokal banyak berlokasi di kawasan Warpramasi yakni Warmare, Perafi, Masni dan Sidey, ditambah dengan Manokwari Selatan. Kawasan ini merupakan kawasan penempatan untuk program transmigrasi yang sudah berlangsung sejak zaman Orde Baru. Distrik Warmare dan Perafi sejak lama dikenal memiliki sumber daya alam yang kompetitif dan perlu diatur kebijakan pengelolannya. Terlebih Distrik Warmare dan Prafi sebagai daerah sumber pertanian dan perkebunan di Kabupaten Manokwari. Dari wilayah inilah, komoditas perkebunan dan pertanian seperti sayur mayor dan buah-buahan berdatangan ke pasar-pasar di pusat kota Manokwari.

Menurut teori pemberdayaan ekonomi, pemberdayaan masyarakat lokal melalui pengelolaan sumber daya alam yang ada dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi (Habib, 2021). Namun, kenyataannya, meskipun kawasan seperti Warpramasi, Warmare, dan Perafi memiliki potensi besar dalam sektor pertanian dan perkebunan, ketergantungan terhadap pengepul luar daerah menunjukkan adanya ketimpangan dalam distribusi dan pengelolaan sumber daya. Ini sejalan dengan teori ketimpangan ekonomi yang menjelaskan bahwa perbedaan dalam akses terhadap sumber daya, modal, dan jaringan ekonomi dapat memperburuk ketidaksetaraan, termasuk dalam sektor pasar tradisional (Mahfuzah et al., 2024). Teori ini menggarisbawahi pentingnya akses yang setara terhadap sumber daya dan kebijakan yang mendukung pemberdayaan ekonomi lokal, yang masih kurang dirasakan oleh mama-mama Papua sebagai pelaku pasar di Manokwari. Oleh karena itu, untuk mengurangi ketimpangan dan mendorong pemberdayaan ekonomi yang lebih efektif, kebijakan pengelolaan sumber daya alam yang inklusif dan mendukung partisipasi aktif masyarakat lokal sangat diperlukan.

Penelitian terdahulu oleh Salehuddin & Edyanto (2023) menunjukkan bahwa strategi dalam pemberdayaan wanita nelayan asli Papua di kabupaten Biak Numfor dilakukan melalui; penyediaan sarana dan prasarana home industri, pemberian pelatihan keterampilan olahan ikan, dan pembentukan kelompok ibu-ibu nelayan. Disamping itu, terbatasnya anggaran dan kesadaran masyarakat yang masih kurang merupakan faktor

penghambat dalam pemberdayaan wanita nelayan asli Papua di kabupaten Biak Numfor. Pergeseran perilaku mama-mama Papua yang kini lebih mengandalkan barang dagangan dari pengepul mencerminkan perubahan signifikan dalam cara mereka berinteraksi dengan pasar tradisional di Manokwari. Sebelumnya, banyak mama-mama Papua yang menjual hasil kebun mereka sendiri sebagai komoditas utama di pasar, menciptakan ikatan yang lebih langsung antara mereka dan sumber daya alam lokal.

Namun, kini banyak yang lebih memilih untuk membeli sayur-sayuran dan buah-buahan dari pengepul dengan harga borongan, yang kemudian mereka jual kembali dengan harapan memperoleh keuntungan. Pergeseran ini menunjukkan adanya ketergantungan pada sistem perdagangan yang lebih terpusat dan dikuasai oleh pengepul luar daerah, yang tentunya mempengaruhi penghasilan dan kemandirian ekonomi mama-mama Papua. Keputusan untuk beralih ke pengepul ini dapat dipengaruhi oleh faktor ketidakstabilan hasil kebun mereka, keterbatasan akses terhadap pasar yang lebih luas, serta kebutuhan untuk memperoleh barang dagangan yang cepat dan praktis untuk dijual. Namun, meskipun memberikan kemudahan jangka pendek, perubahan ini berisiko mengurangi kontrol mereka terhadap sumber daya dan potensi keuntungan yang dapat diperoleh dari produk-produk lokal.

Pemberdayaan Perempuan dalam Kegiatan Ekonomi di Pasar Tradisional Manokwari

Perempuan dalam masyarakat asli Papua mempunyai peranan penting dalam kehidupan keluarganya. Mereka tidak hanya berperan sebagai ibu yang mengurus rumah dan anak, namun sebagian besar juga berperan sebagai pencari nafkah dan penyokong utama ekonomi keluarga. Aktivitas perekonomian mam-mama Papua terutama dapat dilihat di pasar-pasar tradisional di wilayah Papua secara umum, khususnya di Manokwari. Mereka menjual berbagai hasil pertanian seperti pinang, sayur dan buah-buahan. Pendapatan dari penjualan tersebut digunakan untuk membiayai kebutuhan keluarga, khususnya pendidikan anak. Mengingat peran perempuan Papua yang strategis, mereka merupakan sasaran ideal bagi program pemberdayaan masyarakat yang bertujuan mewujudkan kebahagiaan keluarga. Memberdayakan perempuan Papua berarti memberdayakan keluarga, memberdayakan komunitas, dan pada akhirnya memberdayakan masyarakat dan meningkatkan ketahanan nasional.

Kelompok perempuan Papua yang aktif secara ekonomi yang ditemui peneliti di Pasar Wosi, Pasar Sanggeng dan Pasar Borobudur. Mayoritas mereka merupakan masyarakat miskin. Suami mereka tak dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari dengan beragam profesi yang terbatas seperti pemburu, pengolah lahan, tukang ojek atau pekerjaan serabutan lainnya. Di pasar tradisional ini, mama-mama Papua selain bertugas sebagai istri dan ibu di rumah harus keluar untuk berjualan demi menambah pendapatan keluarga. Meski berusaha meningkatkan pendapatan keluarga, pendapatan harian mama-mama Papua masih sangat minim. Berdasarkan hasil wawancara dengan mama-mama pedagang pasar, mereka bisa membawa pulang uang mulai dari Rp 100.000 hingga Rp 200.000 per hari. Namun jumlah ini juga tidak terjadi setiap hari, tergantung apakah mereka menemukan sesuatu untuk dijual atau tidak. Mama-mama Papua ini, seperti disebutkan sebelumnya, biasanya hanya berjualan pinang dan buah-buahan musiman seperti pisang, mangga, ketela, durian yang mereka kumpulkan di sekitar rumah, atau ikan mujaer dan nila hasil tangkapan di rawa-rawa. Karena pengumpulan hasil pertaniannya sederhana. Ketersediaan jumlah barang yang dapat dijual tidak dapat diprediksi, kualitasnya cenderung rendah, karena sama sekali tidak ada standar terhadap produk pertanian yang dijualnya.

Meski demikian, aktivitas perdagangan merupakan jenis pekerjaan yang mayoritas dilakukan orang di Manokwari Provinsi Papua Barat. Menurut data BPS (2017) pada tahun 2016, Pedagang di Kabupaten Manokwari didominasi oleh pedagang kecil dengan 382 orang, diikuti pedagang menengah 445 orang dan hanya 30 orang yang merupakan pedagang besar. Kegiatan pertanian pada masyarakat Kabupaten Manokwari merupakan kegiatan yang bersifat hilir. Selanjutnya hasil pertanian tersebut dijual sendiri pada pasar atau tengkulak yang datang langsung pada masyarakat yang menjadikan sektor pertanian dan perdagangan menjadi sektor utama perekonomian di Manokwari.

Teori pemberdayaan perempuan menyoroti peran vital perempuan dalam ekonomi keluarga dan komunitas, terutama di kalangan masyarakat Papua. Pemberdayaan ekonomi perempuan Papua, khususnya mama-mama yang berjualan di pasar tradisional, memerlukan pendekatan yang komprehensif, meliputi akses yang lebih baik terhadap sumber daya seperti modal, pelatihan keterampilan, dan penyuluhan mengenai manajemen usaha. Hal ini sangat penting karena banyak mama-mama yang masih bergantung pada cara-cara tradisional dalam berusaha, dengan kualitas barang dagangan yang rendah dan tidak ada standarisasi produk yang memadai. Mengingat bahwa mayoritas mama-mama Papua berasal dari keluarga dengan kondisi ekonomi yang terbatas, mereka menghadapi tantangan besar dalam meningkatkan kapasitas usaha mereka. Pemberdayaan ini tidak hanya akan meningkatkan kesejahteraan individu, tetapi juga berpotensi memperkuat ekonomi lokal secara keseluruhan. Melalui peningkatan kualitas produk, akses pasar yang lebih luas, dan peningkatan pengetahuan tentang strategi pemasaran, mama-mama Papua dapat meningkatkan pendapatan mereka dan lebih mandiri

dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi. Oleh karena itu, kebijakan yang mendukung pemberdayaan ekonomi perempuan, khususnya yang terlibat dalam sektor pasar tradisional, sangat diperlukan untuk mewujudkan keberlanjutan ekonomi keluarga dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua.

Penelitian terdahulu dari Indou (2022) menyatakan bahwa sebagai Ibu Kota Provinsi Papua Barat, Manokwari memiliki pusat – pusat belanja yang menyediakan segala kebutuhan untuk seluruh masyarakat Papua. Pasar Wosi, Pasar Sanggeng, dan Pasar Borobudur merupakan beberapa tempat perbelanjaan yang berada di tengah – tengah kota Manokwari yang menampung berbagai macam suku yang ada di Indonesia untuk menjadi pelaku ekonomi usaha. Salah satu contohnya adalah Pasar Wosi yang menjadi tempat terkumpulnya pedagang pendatang dan pedagang Mama – Mama Papua yang menjadikan pasar wosi sebagai tempat untuk jual beli barang dagangan. Oleh sebab itu, perlu untuk mendapatkan perhatian penuh dari pemerintah daerah Kabupaten Maupun Provinsi Papua Barat untuk mengelolah pasar denan baik guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Penelitian lainnya oleh Tarru et al., (2021) menemukan bahwa peranan Orang Asli Papua (OAP) dalam perdagangan sektor informal dan Usaha Kecil Menengah (UKM) masih kurang dalam memperhatikan ketiga aspek penting dalam kewirausahaan, yaitu aspek modal, kreativitas dan inovasi. Artinya, mereka pedagang asli Papua harus membutuhkan kerja keras dengan waktu yang cukup lama untuk lebih maju dan bisa bersaing dengan para pendatang, apabila mereka tidak memperhatikan ketiga aspek penting ini. Tujuannya adalah dengan memperhatikan ketiga aspek ini dapat membuat para pedagang asli Papua memiliki nilai tambah tersendiri, menjadi kreatif, inovatif, berkembang dan semakin maju dalam aktivitas kegiatan perdagangan dan Usaha Kecil Menengah (UKM) di Pasar Sentral Timika.

Pemberdayaan perempuan, khususnya mama-mama Papua, memiliki peranan yang sangat penting dalam mengatasi ketimpangan ekonomi dan sosial yang mereka hadapi. Sebagai tulang punggung keluarga, mama-mama Papua seringkali harus bekerja keras di pasar tradisional untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, meskipun pendapatan yang mereka hasilkan belum cukup stabil. Pemberdayaan mereka bukan hanya mengenai peningkatan kemampuan ekonomi, tetapi juga pengakuan terhadap peran vital mereka dalam menjaga kelangsungan hidup keluarga dan komunitas. Mama-mama Papua sering kali terjebak dalam sistem perdagangan yang tidak menguntungkan, seperti ketergantungan pada pengepul yang mengatur harga barang dagangan mereka. Untuk itu, pemberdayaan mereka harus melibatkan akses yang lebih luas terhadap pelatihan keterampilan, modal usaha, serta pengembangan jaringan distribusi yang adil. Selain itu, kebijakan yang mendukung usaha mereka, seperti penyediaan fasilitas yang memadai di pasar tradisional dan penguatan kapasitas melalui pendidikan ekonomi, dapat menjadi langkah strategis dalam meningkatkan daya saing dan kemandirian ekonomi mama-mama Papua. Pemberdayaan yang tepat sasaran tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga membantu meningkatkan posisi tawar mereka dalam struktur sosial yang lebih luas.

Upaya Pemerintah dalam Pemberdayaan Mama-mama OAP Pelaku Pasar di Manokwari

Masyarakat mayoritas melakukan usaha berdagang dengan produk hasil alam daerah, yaitu seperti hasil perkebunan dan pertanian yang ditanam sendiri ataupun di beli dari pihak lain sebelum dijual lagi. Masyarakat melakukan usaha berdagang terlihat setiap hari dan dengan durasi waktu sampai produk habis terjual. Data dari Disperindagkop Manokwari menunjukkan penumpukan pedagang terdapat di wilayah Manokwari Barat. Pasar Wosi, Pasar Sanggeng dan Pasar Borobudur terletak di Manokwari Barat. Berikut ini sebaran data berbagai jenis pedagang di sejumlah distrik di Kabupaten Manokwari:

Tabel 2 <Banyaknya Pedagang di Kabupaten Manokwari Tahun 2022 – 2023>

Distrik	Pedagang Besar	Pedagang Menengah	Pedagang kecil
Warmare	-	8	32
Prafi	1	12	41
Manokwari barat	18	205	410
Manokwari timur	3	108	117
Manokwari utara	4	46	65
Manokwari selatan	1	31	51
Tanah Rubuh	2	18	17
Masni	1	10	52
Sidey	-	7	25
Jumlah 2022	30	445	810

Data: Disperindagkop Kab Manokwari

Dari data di atas, wilayah-wilayah yang sudah maju dan infrastrukturnya sudah lengkap seperti di Manokwari Barat dan juga Manokwari Selatan terjadi penumpukan pedagang dibanding daerah lainnya. Hal

ini sangat wajar karena perdagangan merupakan salah satu aktivitas masyarakat sosial dan ciri sebuah peradaban. Secara umum, pasar tradisional di Papua merupakan ruang sosial yang mencerminkan masyarakat lokal dan permasalahannya. Permasalahan utamanya adalah ketimpangan akses ekonomi yang tercermin dari perjuangan mama-mama Papua. Sementara itu, pasar dapat menyelesaikan beberapa permasalahan seperti kesehatan, pendidikan, politik lokal hingga upaya menghindari kekerasan dalam rumah tangga. Permasalahan akses terhadap pasar merupakan permasalahan klasik hingga saat ini. Kendati demikian beberapa upaya yang dilakukan oleh Solidaritas Pedagang Asli Papua (SOLPAP) seperti solidaritas terhadap mama-mama pedagang di Jayapura-Papua yang aktif mengadvokasi kepentingan mama-mama Papua telah ada sejak tahun 2008. Gerakan sosial ini mempunyai upaya untuk mengupayakan pengembangan pasar bagi mama-mama. Selain itu, beberapa pertemuan dengan pemerintah kota, DPRD, dan DPRD telah diselenggarakan oleh gerakan ini. Namun, sayangnya gerakan semacam ini belum nampak di Kota Manokwari, Papua Barat. Sejumlah upaya telah dilakukan oleh pemerintah Provinsi Papua Barat melalui Dinas Sosial untuk menggerakkan dan memberdayakan mama-mama pelaku pasar, di antaranya langkah-langkah yang telah dilakukan ialah:

Pembangunan Lapak Jualan

Pemberdayaan sosial dan ekonomi bagi pedagang Mama Papua di provinsi Papua Barat terus digenjut lewat penyediaan lapak jualan di 13 kabupaten dan kota oleh pemerintah provinsi ini. Program pembangunan lapak jualan bagi Mama Papua di provinsi ini telah berjalan sejak 2018. Sekitar 500-unit lapak jualan untuk pemberdayaan ekonomi Mama Papua yang berprofesi sebagai pedagang sudah dibangun.

Pendampingan

Pemberdayaan sosial dan ekonomi pedagang Mama Papua di provinsi ini tidak dapat dipisahkan karena masih membutuhkan pendampingan antara kehidupan sosial dan ekonomi keluarga. Usaha mama Papua selama ini hanya sebatas usaha rumah tangga dengan jualan buah pinang dan sayuran, hasilnya pun sekali pakai untuk belanja kebutuhan keluarga. Program ini dikemas khusus bagi pedagang Mama Papua agar termotivasi untuk meningkatkan usaha rumah tangga mereka dan tidak terfokus pada buah pinang, tapi juga dengan jualan hasil olahan pangan lokal. Petugas Sosial bersama mitra perbankan akan berikan pendampingan kepada pedagang Mama Papua tentang catatan keuangan serta pembukaan rekening tabungan untuk mengelola usaha yang digeluti.

Stimulan Modal Usaha

Selain pembangunan fisik lapak jualan, Mama Papua yang berprofesi sebagai pedagang pun akan diberikan stimulan modal usaha senilai Rp10 juta per-orang melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) provinsi, yang penyalurannya melalui mitra bank pendamping. Selain itu, tambahnya, di tahun anggaran 2022 ada tambahan modal usaha bagi Mama Papua yang sudah terdata dari 13 kabupaten dan kota. Derasnya laju arus pembangunan di wilayah Papua secara umum, sayangnya tidak diiringin dengan kepedulian dan dukungan pemerintah kepada mama-mama Orang Asli Papua pelaku pasar. Meskipun bantuan dan pendampingan kepada Mama-mama namun upaya tersebut dinilai masih kurang. Menurut keterangan dari responden A, di Pasar Sanggeng, selama 15 tahun berdagang di pasar, ia mengaku hanya mendapat sedikit sentuhan dari pemerintah daerah. Menurut pengakuannya, ia hanya mendapat bantuan modal usaha sebanyak 10 juta sebanyak satu kali selama belasan tahun beraktivitas di pasar tradisional. Padahal, selaku pedagang, ia dan ratusan pedagang lainnya mengaku setiap hari membayar pajak retribusi kepada pemerintah daerah.

Menurut Peraturan Gubernur Provinsi Papua Barat Nomor 17 Tahun 2018 menetapkan bahwa dalam hal mendukung kegiatan ekonomi Orang Asli Papua, Pemerintah Kabupaten Manokwari melalui Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Papua Barat mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Menurut Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Manokwari, Drs. Stepanus Selang, MM, terdapat tiga hal mendesak yang harus menjadi perhatian utama dalam pengembangan UMKM di wilayah ini.

"Pertama, perlu ada peningkatan kualitas dan daya saing produk UKM agar lebih adaptif terhadap perkembangan dan tren pasar. Kedua, kita harus segera menyelesaikan permasalahan pada koperasi-koperasi yang bermasalah serta memperkuat SDM di bidang perkoperasian. Ketiga, penguatan UMKM sangat penting, termasuk implementasi teknologi informasi dalam pengembangan usaha mereka,"

Adapun, sasaran strategis, program, kegiatan serta subkegiatan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM untuk pemberdayaan mam-mama OAP di sektor ekonomi terutama yang terkait dengan kegiatan di pasar tradisional dapat dilihat dalam tabel 3.

Hasil dari observasi peneliti di lapangan menunjukkan proses kegiatan penataan pedagang pasar meliputi beberapa tahapan yaitu mengoptimalkan komunikasi dalam pendataan serta bersosialisasi tentang peraturan di Kabupaten Manokwari dan membuat kegiatan tentang berwirausaha atau pelatihan bagi pedagang kaki lima

secara umum, kemudian tahapan pembinaan terhadap pedagang dan tahapan dimana penataan kebersihan bagi pedagang.

Tabel 3 <Program dan Kegiatan untuk pemberdayaan Mama-mama di Pasar Tradisional>

Sasaran Strategis	Program	Kegiatan	Subkegiatan
Pemberdayaan perekonomian daerah yang didukung oleh pemanfaatan potensi sumber daya lokal lintas sektor meningkat.	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	- Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	- Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi.
	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	- Pendidikan dan Latihan UKM bagi UKM yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	- Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UKM
		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	- Perluasan Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha
	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan.	- Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan
	Program Pengembangan Umkm	Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi

Pelaksanaan kegiatan komunikasi dilakukan dengan melakukan kegiatan sosialisasi Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari dan kebijakan yang berkaitan tentang penataan pedagang. Menurut Kepala Bidang Perdagangan kegiatan sosialisasi kepada pedagang kaki lima merupakan kegiatan yang senantiasa rutin dilakukan. Kegiatan sosialisasi dilakukan oleh Dinas Perindustrian, Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM dalam rangka memberikan penjelasan dan pemahaman kepada para pedagang kaki lima terkait hak, kewajiban dan ketentuan yang berlaku bagi seluruh pedagang.

Namun, meskipun program penguatan kapasitas ekonomi Orang Asli Papua (OAP) telah berjalan, implementasinya sering kali hanya sebatas formalitas. Hal ini diperkuat oleh pernyataan akademisi Universitas Papua, Dedi Inan, yang menekankan lemahnya dukungan pemerintah terhadap kegiatan ekonomi OAP. Penelitian Universitas Papua menggunakan metode Structural Equation Model (SEM) menunjukkan bahwa dukungan pemerintah, yang berkontribusi sebesar 40%, merupakan faktor penting dalam akselerasi peningkatan kegiatan ekonomi, terutama di pasar tradisional. Sayangnya, dukungan tersebut sangat minim dirasakan oleh mama-mama pelaku pasar di Manokwari, Papua Barat. Penelitian oleh Abd Kadir et al., (2022) menemukan bahwa, pertama, pedagang lokal merupakan tanggung jawab besar bagi pemerintah untuk bisa dikembangkan, karena pedagang lokal terutama mama-mama Papua yang berjualan sekarang bersaing dengan pedagang atau retail modern. Kedua, dalam pengembangan pedagang lokal ini membutuhkan strategi yang jelas dan tepat dari pemerintah sendiri guna bisa menjawab setiap permasalahan yang ada dalam pengembangan pedagang-

pedagang lokal terutamamama-mama papua. Saran yaitu Peran Pemerintah Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Lokal Di Distrik Sorong Utara Kota Sorong masih perlu dan harus ditingkatkan yaitu dengan mengadakan sosialisasi atau pelatihan untuk meningkatkan keahlian pedagang lokal dalam berdagang serta bantuan dalam pemodal dan fasilitas yang menunjang kegiatan berdagang.

Upaya pemerintah dalam memberdayakan mama-mama Papua di pasar tradisional, seperti sosialisasi Peraturan Daerah dan pelatihan kewirausahaan, mencerminkan langkah awal yang penting dalam menguatkan peran perempuan sebagai pilar ekonomi keluarga. Namun, penelitian ini menunjukkan bahwa dukungan tersebut sering kali bersifat formalitas dan belum menjawab kebutuhan spesifik, seperti akses modal, pelatihan berkelanjutan, dan fasilitas pasar yang memadai. Minimnya dukungan ini menciptakan kesenjangan antara kebijakan yang direncanakan dan dampaknya di lapangan, sehingga pemberdayaan ekonomi belum optimal. Hal ini selaras dengan teori pembangunan berkelanjutan yang menekankan pentingnya kebijakan berbasis kebutuhan lokal untuk menciptakan pembangunan yang inklusif. Selain itu, teori pemberdayaan perempuan juga menegaskan perlunya intervensi terarah, seperti akses teknologi dan pasar, agar perempuan dapat berperan aktif dalam ekonomi. Dengan pendekatan yang lebih komprehensif, mama-mama Papua dapat dimaksimalkan potensinya sebagai agen pembangunan ekonomi masyarakat lokal.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diakui untuk memberikan konteks yang lebih jelas terhadap temuan yang diperoleh. Salah satu keterbatasan adalah cakupan wilayah yang hanya terbatas pada pasar tradisional di Manokwari, sehingga hasil penelitian belum sepenuhnya merepresentasikan kondisi di wilayah Papua lainnya. Selain itu, data yang dikumpulkan lebih banyak bersifat deskriptif dan belum sepenuhnya menggali aspek kuantitatif, seperti kontribusi ekonomi mama-mama Papua terhadap pendapatan regional. Penelitian ini juga belum secara mendalam mengeksplorasi dampak dari kebijakan pemerintah yang spesifik terhadap pemberdayaan perempuan di sektor informal. Untuk penelitian lanjutan, disarankan agar fokus diperluas ke wilayah lain di Papua untuk memahami variasi sosial-ekonomi yang mungkin ada. Pendekatan kuantitatif yang mengukur dampak program pemberdayaan terhadap peningkatan pendapatan dan kualitas hidup mama-mama Papua juga dapat dilakukan untuk memberikan data yang lebih holistik. Penelitian mendatang juga dapat menggali lebih dalam peran teknologi digital dalam memperluas akses pasar bagi mama-mama Papua.

Simpulan

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa ketimpangan kepemilikan komoditas di pasar tradisional Manokwari masih menjadi isu yang signifikan, di mana mama-mama Papua menghadapi keterbatasan dalam akses terhadap sumber daya ekonomi, seperti modal, teknologi, dan jaringan distribusi. Ketimpangan ini menciptakan kesenjangan daya saing antara pedagang lokal dan pedagang yang lebih mapan, terutama yang mengandalkan pasokan dari pengepul. Penelitian ini juga mengungkapkan bahwa upaya pemberdayaan ekonomi oleh pemerintah dan organisasi terkait masih bersifat sporadis dan kurang efektif dalam menjawab kebutuhan strategis mama-mama Papua, baik dari segi pelatihan keterampilan, pendampingan usaha, maupun penguatan akses terhadap pasar yang lebih luas. Untuk mengurangi ketimpangan tersebut, diperlukan kebijakan yang lebih inklusif dan berbasis kebutuhan lokal, termasuk optimalisasi dukungan terhadap sektor UMKM, peningkatan keterampilan melalui pelatihan yang berkelanjutan, dan pengembangan infrastruktur pasar yang ramah bagi pedagang kecil. Dengan langkah tersebut, diharapkan pemberdayaan ekonomi mama-mama Papua dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan, sehingga memperkuat posisi mereka dalam struktur ekonomi lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua secara keseluruhan.

Referensi

- Abd Kadir, M. A., Ali, M., & Salmah, U. (2022). Peran Pemerintah Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Lokal Di Distrik Sorong Utara Kota Sorong (Studi Pada Pedagang Lokal Mama-mama Papua Di Depan Jupiter Super Market). *Jurnal Ilmiah Mandala Education*, 8(3). <http://dx.doi.org/10.58258/jime.v8i3.3770>
- Azizah, R. N., Luaylik, N. F., & Saputri, E. (2023). Model Pemberdayaan Perempuan Dalam Mengurangi Angka Kemiskinan di Kabupaten Pamekasan. *Jurnal Mediasosian: Jurnal Ilmu Sosial Dan Administrasi Negara*, 7(2), 280–293. <https://doi.org/10.30737/mediasosian.v7i2.4923>
- Bapuji, H., Ertug, G., & Shaw, J. D. (2020). Organizations and societal economic inequality: A review and way forward. *Academy of Management Annals*, 14(1), 60–91. <https://doi.org/10.5465/annals.2018.0029>
- Cvijanović, D., Ignjatijević, S., Vapa Tankosić, J., & Cvijanović, V. (2020). Do local food products contribute to sustainable economic development? *Sustainability*, 12(7), 2847. <https://doi.org/10.3390/su12072847>

- Darwin Lie, S. E., MM, L. E. N., Nana Triapnita Nainggolan, S. E., MM, L. D. S., SE, M. A., & Hery Pandapotan Silitonga, S. E. (2022). *Indeks Pembangunan Manusia Dengan Pertumbuhan Ekonomi*. CV. Azka Pustaka.
- Dewi, E. Y., Yuliani, E., & Rahman, B. (2022). Analisis peran sektor pertanian terhadap pertumbuhan perekonomian wilayah. *Jurnal Kajian Ruang*, 2(2), 229–248.
- Enaifoghe, A., & Vezi-Magigaba, M. F. (2023). Conceptualizing the role of entrepreneurship and SME in fostering South Africa's local economic development. *International Journal of Research in Business and Social Science (2147-4478)*, 12(4), 96–105. <https://doi.org/10.20525/ijrbs.v12i4.2444>
- Fatahillah, T. N., Ananda, C. F., & Prasetyia, F. (2021). Dana otonomi khusus Papua, tingkat pembangunan daerah, dan kapasitas pajak. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 6(4), 345–359. <https://doi.org/10.33105/itrev.v6i4.429>
- Fenetiruma, O. A., Hutabarat, M., Palinggi, Y., Sumule, A., Waromi, J., Holle, Y., Tjolli, I., Yuminarti, U., Matualage, A., Sagrim, M., Daeng, B., Suparno, A., Lindongi, L. E., Romainum, I. M., Sala, R., Bawole, R., Kusuma, A. B., Toja, Y. T., Manangkalangi, E., ... Dedi, S. (2022). Masalah dan Harapan Pembangunan Pertanian di Papua. *Pembangunan Pertanian Berkelanjutan Di Papua*, 113.
- Goya-Tocchetto, D., & Payne, B. K. (2022). How economic inequality shapes thought and action. *Journal of Consumer Psychology*, 32(1), 146–161. <https://doi.org/10.1002/jcpsy.1277>
- H Hermanto Suaib, M. M. (2017). *Suku Moi: nilai-nilai kearifan lokal dan modal sosial dalam pemberdayaan masyarakat*. AnImage.
- Habib, M. A. F. (2021). Kajian teoritis pemberdayaan masyarakat dan ekonomi kreatif. *Ar Rehla: Journal of Islamic Tourism, Halal Food, Islamic Traveling, and Creative Economy*, 1(2), 82–110. <https://doi.org/10.21274/ar-rehla.v1i2.4778>
- Habib, M. A. F., & Sutopo, S. (2024). Pembinaan Umkm Dalam Aspek Komunikasi Pemasaran Sebagai Wujud Pemberdayaan Perempuan Di Sekitar Kawasan Wisata Pantai. *Journal of Islamic Tourism Halal Food Islamic Traveling and Creative Economy*, 4(1), 85–100. <https://doi.org/10.21274/ar-rehla.v4i1.9640>
- Hasid, H. Z., SE, S. U., Akhmad Noor, S. E., Se, M., & Kurniawan, E. (2022). *Ekonomi sumber daya alam dalam lensa pembangunan ekonomi*. Cipta Media Nusantara.
- Ihya'Ulummudin, N., Mawlana, A., Septiana, A., & Legowo, M. (2022). Membongkar Budaya Patriarki Madura: Studi Fenomenologi Pasar Tradisional di Desa Labang sebagai Ruang Publik Perempuan Madura. *Jurnal Ilmiah Penalaran Dan Penelitian Mahasiswa*, 6(2), 142–157. <https://www.jurnal.ukmpenelitianunyu.id/index.php/jippm/article/view/260>
- Indou, A. (2022). *Dampak Penerapan Otonomi Khusus Papua Barat Terhadap Orang Asli Papua Dalam Kepemilikan Lapak Di Pasar Wosi Kabupaten Manokwari*. Universitas Nasional. <http://repository.unas.ac.id/id/eprint/5849>
- Jetten, J., Peters, K., Álvarez, B., Casara, B. G. S., Dare, M., Kirkland, K., Sánchez-Rodríguez, Á., Selvanathan, H. P., Sprong, S., & Tanjitpiyanond, P. (2021). Consequences of economic inequality for the social and political vitality of society: A social identity analysis. *Political Psychology*, 42, 241–266. <https://doi.org/10.1111/pops.12800>
- Kowarin, L. R. N., Fitriana, F., & Santoso, R. A. (2024). Pemberdayaan Perempuan Papua Untuk Kemajuan Ekonomi Lokal. *Jurnal Bina Bangsa Ekonomika*, 17(2), 1882–1898. <https://doi.org/10.46306/jbbe.v17i2.625>
- Leigh, N. G. (2024). *Planning local economic development: Theory and practice*. SAGE publications.
- Lermating, K. F., Aidore, H. J. Y., & Paiki, F. D. (2024). Ketersediaan Dan Aksesibilitas Pangan Lokal: Implikasinya Terhadap Ketahanan Pangan Di Distrik Konda Kabupaten Sorong Selatan Provinsi Papua Barat Daya. *Jurnal Administrasi Terapan*, 3(1), 102–110.
- Macpal, S. J., & Sahetapy, W. (2024). Pemberdayaan Perempuan Papua untuk Kemajuan Ekonomi Lokal. *Social Sciences and Hospitality*, 1(01), 13–22. <http://drjpublisher.org/index.php/SSCH/article/view/4>
- Mahfuzah, N. Z., Nasution, Z., & Lubis, F. (2024). Implikasi Globalisasi dan Kapitalisme Perspektif Teori Dependensi. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 9(3). <https://doi.org/10.30651/jms.v9i3.23226>
- Muhammad, F. M. (2022). *Pemberdayaan Perempuan Dalam Pengembangan Life Skill Dengan Memanfaatkan Potensi Lokal Di Desa Semuli Raya Kecamatan Abung Kabupaten Lampung Utara*. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. <http://repository.radenintan.ac.id/20177/>
- Muna, F. (2023). *Pasar Tradisional Sebagai Ruang Publik Perempuan*. <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/23677>
- Nuham, J. (2018). *Kebijakan Hukum Daerah Dalam Penentuan Harga Dan Lokasi Pasar Tradisional Sanggeng Terhadap Bisnis Dagang Di Kabupaten Manokwari*. Uajy.

-
- Permatasari, A., SW, A. A. P., Suhendi, A. R., Nurhasanah, D. M., Abdullah, I., & Wardiyah, M. L. (2024). Analisis Mekanisme Pasar Dalam Pasar Tradisional Di Indonesia. *Neraca: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 2(6), 688–698. <https://doi.org/10.572349/neraca.v2i6.1882>
- Resubun, M. L. (2017). *Jangan Rusak Rumah Ku: Save Papua*. Nomaden Institute.
- Rochendi, S., & Saleh, K. A. (2017). Hubungan pemerintah pusat dan daerah dalam otonomi khusus di Provinsi Papua Barat. *POLITIK*, 13(1). <https://journal.unas.ac.id/politik/article/view/231>
- Rumkabu, E., Amenes, A. A., Elisabeth, A., & Suryawan, I. N. (2023). *Merebut kendali kehidupan: perjuangan orang Wambon di Boven Digoel menghadapi serbuan investasi*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Salehuddin, S., & Edyanto, E. (2023). Strategi Pemberdayaan Wanita Nelayan Asli Papua Di Kabupaten Biak Numfor. *Resolusi: Jurnal Sosial Politik*, 6(1), 1–15. <https://doi.org/10.32699/resolusi.v6i1.3752>
- Setiadi, M. T., Rahayu, B., Utari, T., ZA, S. Z., & Yunita, E. A. (2023). Pemberdayaan Wirausaha Wanita di Permukiman Kumuh Urban: Pendekatan Penelitian Aksi. *Jurnal Abdimas Peradaban*, 4(2), 1–11. <https://doi.org/10.54783/ap.v4i2.23>
- Suasidewi, D. G., Latupeirissa, J. J. P., Suryawan, I. M. Y., Natashya, R., Mufida, I., & Supriyani, A. (2024). Transformasi Ekonomi Dan Sosial: Dampak Pemberdayaan Perempuan Di Indonesia Berdasarkan Kajian Literatur. *Governance: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal Dan Pembangunan*, 11(2), 12–27. <https://doi.org/10.56015/gjikplp.v11i2.310>
- Sujarot, S. (2024). Perempuan Single Parent dan Kemandirian Ekonomi di Gurabesi Jayapura Utara. *Indonesian Journal of Intellectual Publication*, 5(1), 9–19. <https://doi.org/10.51577/ijpublication.v5i1.562>
- Syahri, D., & Gustiara, Y. (2020). Pengaruh pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan terhadap ketimpangan pendapatan di Sumatera Utara periode 2015-2019. *Journal of Trends Economics and Accounting Research*, 1(1), 34–43. <https://journal.fkpt.org/index.php/jtear/article/view/59>
- Tarru, M. R., Goni, S. Y. V. I., & Purwanto, A. (2021). Peranan Orang Asli Papua (OAP) Dalam Perdagangan Sektor Informal Dan Usaha Kecil Menengah (UKM) di Pasar Sentral Timika Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika Papua. *Jurnal Ilmiah Society*, 1(1). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnalilmiahsociety/article/view/35964>
- Warda, N., Faqih, A., Kurniawan, A., Nurshadrina, D. S., Widyaningsih, D., & Kusumandari, S. A. (2024). *Mengisi Kekosongan dalam Sistem Perlindungan Sosial di Papua: Pentingnya Perlindungan Sosial Adaptif untuk Membangun Ketangguhan Orang Asli Papua*. https://smeru.or.id/sites/default/files/publication/rr_kurawal_oap_2024-9-24_final.pdf
- Windari, W. (2021). Model pemberdayaan masyarakat dalam upaya pembangunan ekonomi lokal berbasis produksi di pedesaan. *Agriekstensi: Jurnal Penelitian Terapan Bidang Pertanian*, 20(1), 90–106. <https://doi.org/10.34145/agriekstensi.v20i1.1506>
- Yulianah, S. E. (2022). *Metodelogi Penelitian Sosial*. CV Rey Media Grafika.